



---

## **Peran Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam**

---

### **INFO PENULIS**

Rika Lestari  
Universitas Negeri Padang  
Indonesia  
[Rikharikha5527@gmail.com](mailto:Rikharikha5527@gmail.com)

Fitri Eriyanti  
Universitas Negeri Padang  
Indonesia  
[Fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id](mailto:Fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 4, No. 3, Desember 2024  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Lestari, R., & Eriyanti, F. (2024). Peran Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1864-1869.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka di Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Nagari dalam melakukan pemberdayaan Kelompok Usaha Tani di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, pemilihan informan penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan informasi yang diseleksi ialah memakai observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Buat menguji keabsahan informasi dalam riset ini hingga dicoba metode triangulasi, dalam riset ini metode triangulasi yang dicoba ialah triangulasi sumber. Sebaliknya, metode analisis informasi yang diseleksi melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Hasil penelitian ini adalah Peran Pemerintah Nagari Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Pagadih terhadap Pengembangan Kelompok usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka Sudah berperan cukup baik namun belum optimal. Hal ini dapat diketahui bahwa Peran Pemerintah Nagari belum menjalankan perannya secara maksimal yaitu, belum adanya Peraturan Nagari tentang Kelompok Usaha Tani, belum maksimalnya Pemerintah Nagari dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka, belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka dan belum adanya izin legalitas produk Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka

**Kata Kunci:** Peran, Pemberdayaan, Kelompok Usaha Tani

### Abstract

This research aims to analyze the role of the Nagari government in empowering the Alam Merdeka Agroforestry Farming Business Group in Nagari Pagadih, Palupuh District, Agam Regency and determine the supporting and inhibiting factors for the Nagari Government in empowering Farming Business Groups in Nagari Pagadih, Palupuh District, Agam Regency. This type of research is qualitative research using descriptive methods, selecting research informants using purposive sampling. The information collection method selected was observation, interviews and documentation studies. To test the validity of the information in this research, a triangulation method was tried. In this research, the triangulation method used was source triangulation. On the other hand, the information analysis method selected is through data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this research are the Role of the Nagari Government in Empowering the Community in Nagari Pagadih towards the Development of the Independent Nature Agroforestry Farming Business Group. It has played a fairly good role but is not yet optimal. It can be seen that the role of the Nagari Government has not carried out its role optimally, namely, there is no Nagari Regulation regarding Farming Business Groups, the Nagari Government has not been optimal in providing training and assistance to the Merdek Natural Agroforestry Farming Business Group, the facilities and infrastructure of the Farming Business Group are not yet complete. Agroforesti Alam Merdeka and there is no legal permit for the products of the Agroforesti Alam Merdeka Farming Business Group

**Keywords:** Role, Empowerment, Farming Age Groups

### A. Pendahuluan

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Negara Indonesia. Sumatera Barat adalah daerah otonomi yang memiliki hak , wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintah nya sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk 5.640.472 jiwa yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dan 1265 nagari dan desa. Dalam pasal 5 menyebutkan kelembagaan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari yang di sebut dengan Walinagari dan dibantu oleh perangkat Nagari. Selanjutnya dalam pasal 10 wali nagari Pemerintah Nagari memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan sistem pemerintahan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dalam pemberdayaan masyarakat nagari. Dalam menjalankan sistem Pemerintahan, Pemerintah Nagari sangat berperan penting dalam pemberdayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan nagari akan tepat sasaran jika di lakukan dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan di Nagari, Pemerintah Nagari wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas. Walinagari selaku kepala Pemerintahan Nagari yang memimpin suatu Nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Walinagari dengan bekerja sama dengan perangkat Nagari dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Nagari dan memiliki wewenang selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan nagari dan aset nagari, serta melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat nagari dan mengembangkan serta melestarikan kehidupan sosial masyarakat di Nagari. Maka dari itu dalam menyelenggarakan Pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkat sumber daya masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari harus menjalankan perannya dengan baik.

Nagari pagadih dipimpin oleh Walinagari sebagai kepala pemerintahan Nagari dan di bantu oleh Perangkat Nagari, Badan Pemusyawaratan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Walinagari selaku kepala Pemerintahan Nagari dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, dan menjalankan perannya salah satunya upaya Pemerintahan Nagari Pagadih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Komoditas masyarakat di Nagari Pagadih memiliki mata pencarian sebagai petani, seluas 705Ha lahan masyarakat milik pribadi di jadikan sebagai lahan untuk bertani padi dan seluas 1600Ha digunakan masyarakat untuk berkebun. Tanaman kopi dan kulit manis adalah jenis tanaman utama yang di tanam masyarakat dan telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Selain tanaman kopi masyarakat juga masyarakat juga menanam tanaman tua lainnya seperti kulit manis, gambir, serai wangi, durian, jeruk, pisang, nangka dan padi. Selain sebagai petani

dan pekebun masyarakat Nagari Pagadih juga memiliki mata pencarian sebagai peternak, petagang, usaha kerajinan bordir, tenaga honorer dan pegawai negeri sipil.

Salah satu upaya Walinagari dalam menjalankan perannya di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari adalah melalui pengembangan kelompok tani dengan cara pembentukan kelompok usaha tani. Salah satu program kelompok usaha tani yang di kembangkan oleh pemerintah Nagari adalah Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka yang berfokus pada pengembangan budi daya tanaman kopi robusta. Nagari Pagadih memiliki luas lahan perkebunan kopi seluas 17 Ha lahan milik masyarakat perorangan sedangkan 3 Ha lahan perkebunan kopi milik Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka. Tanaman kopi di Nagari Pagadih sudah ada sejak tahun 80-an yang di kelola oleh masyarakat secara perorangan sebagai salah satu penghasilan utama bagi masyarakat Nagari Pagadih, sehingga Nagari Pagadih menduduki Nagari penghasil kopi terbanyak dan terbaik pada zaman itu. Seiring berkembangnya zaman tanaman kopi mengalami harga jual rendah sehingga masyarakat mengantikan tanaman kopi dengan tanaman kulit manis dan gambir perkebunan kopi tidak produktif lagi. Sejak tahun 2015 masyarakat kembali mengaktifkan kembali perkebunan kopi dan pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Kabupaten Agam mengeluarkan kebijakan tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Alam Merdeka Pada Lembaga Pengelolaan Hutan Lindung (LPHN) Nagari Pagadih yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat Nagari Pagadih terkhususnya Pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka.

Pada awalnya Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka Nagari Pagadih di modali oleh Pemerintah Daerah salah satunya Dinas Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu World Resources Institute (WRI) yang merupakan lembaga penelitian independen non pemerintahan yang bekerja sama dengan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan berbasis hutan. Adapun bantuan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah dan WRI yaitu berupa bantuan bibit tanaman kopi dan alat produksi pengolahan kopi. Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka berjumlah 20 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Pemerintahan Nagari yang bernama Bapak Edo Wardo pada tanggal 1 Agustus 2024 bahwa saat ini di Nagari Pagadih ada dua kelompok usaha tani yang di kembangkan oleh Pemerintah Nagari dibawah naungan Dinas Kehutanan Kabupaten Agam yaitu Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka dan Kelompok Agro Eduwisata Lebah Madu Galo Galo.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti temukan di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa fungsi dari pemerintah nagari dalam meperdayakan masyarakat nagari masih belum berjalan dengan optimal terutama dalam pengembangan kelompok usaha tani tersebut. Hal tersebut dapat di lihat dari beberapa fungsi tersebut, yaitu 1) belum optimalnya penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan dalam produksi, 2) belum adanya pengawasan terhadap kualitas produk, 3) masih kurangnya penyelenggaraan dalam pemasaran produk sehingga 4) belum adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Nagari mengenai Pengembangan kelompok tani sehingga masyarakat Nagari Pagadih masih belum merasakan manfaatnya sepenuhnya, 5) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari.

Pemberian fasilitasi seperti pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi mengenai pengembangan Kelompok Usaha Tani sudah pernah diberikan oleh Pemerintah Nagari namun masih belum berjalan optimal, di karenakan terbatasnya anggaran dana yang di khususkan untuk pengembangan Kelompok Usaha Tani dan rendahnya Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang di adakan oleh pemerintah Nagari.

Minimnya kegiatan pelatihan yang di berikan kepada masyarakat khususnya pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka memberikan dampak pada kreatifitas dan keterbatasan kemampuan mereka terhadap pengembangan Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat yang dalam mengikuti pelatihan tentang pengelolaan produk dan pengembangan Kelompok Usaha Tani sehingga juga memberikan dampak kepada mereka yaitu belum terampilnya masyarakat dalam pengoperasian alat produksi.

Dalam hal pemberian bantuan sarana prasarana atau alat mesin produksi dalam meningkatkan kualitas produk dari Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka belum ada, hal ini dikarenakan terbatasnya dana Pemerintah Nagari sehingga Pemerintah Nagari baru mampu memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka. Terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan, sosialisai dan penyuluhan kepada Pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka sudah dilaksanakan namun belum optimal yaitu mengenai pelatihan pengolahan produk, pembibitan dan pemasaran namun

belum berjalan maksimal. Kemudian untuk pemberian bantuan alat produksi itu belum dilakukan oleh Pemerintah Nagari hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Nagari. Adapun bantuan alat atau mesin produksi kopi yang dimiliki oleh pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka itu bantuan dari pihak WRI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam belum adanya penyuluhan mengenai pengelolaan lahan pertanian, belum adanya pelatihan dan sosialisasi mengenai pengembangan usaha kelompok tani, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang untuk keberhasilan usaha kelompok tani tersebut.

Selain itu, kualitas produk yang di hasilkan masih belum maksimal dan kemasakan yang kurang menarik membuat nilai rendah sehingga belum mampu menunjang perekonomian pelaku kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka. Selanjutnya Pemerintah Nagari juga belum menerbitkan kebijakan atau dasar hukum untuk di jadikan sebagai acuan oleh pelaku dalam pengembangan Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka. Kemudian apabila dilihat dari penyelenggaraan dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya, Pemerintah Nagari sudah melakukan kegiatan promosi dan pemasaran terhadap produk Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka. Pemberian pelatihan terkait pemasaran digital dalam membantu pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka dalam memanfaatkan teknologi dan jangkau pasar lebih luas oleh Pemerintah Nagari. Namun pelatihan saja tentu saja tidak cukup karena di butuhkan pendampingan keahlian yang dapat memberikan panduan pembinaan terkait pemasaran berbasis digital. dalam hal pemberian pendampingan keahlian di lapangan belum ada di lakukan

Dengan melihat permasalahan diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Nagari belum menjalankan perannya dengan baik. Pemerintah Nagari seharusnya memainkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala Pemerintahan baik dalam menyediakan pelatihan, pendampingan dan memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka, sehingga dengan tingginya kualitas sumber daya masyarakat mereka akan lebih siap dalam menghadapi tantangan perekonomian dan mampu mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Belum optimalnya kegiatan dalam pengembangan program kelompok usaha tani seperti pelatihan, pemberian bantuan sarana dan sarana dan rendahnya sumber daya anggota kelompok tani memberikan dampak kepada kreatifitas dan keterbatasan pengetahuan anggota kelompok tani dalam pengelolaan dan pengembangan hasil dari kelompok tani tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Peran Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam."

## **B. Metodologi**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, pemilihan informan penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data yang diseleksi ialah memakai observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Buat menguji keabsahan informasi dalam riset ini hingga dicoba metode triangulasi, dalam riset ini metode triangulasi yang dicoba ialah triangulasi sumber. Sebaliknya, metode analisis informasi yang diseleksi melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan ataupun verifikasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Peran Pemerintah Nagari Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani di Nagari Pagadih**

Adapun peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok usaha tani di Nagari Pagadih antara lain, sebagai berikut :*Reliability* (Kehandalan)

#### **a. Peran Pemerintah Nagari sebagai Regulator**

Berdasarkan hasil temuan Peneliti di Nagari Pagadih terkait Peran Pemerintah Nagari sebagai regulator diketahui hingga saat ini belum adanya Peraturan Nagari yang disahkan oleh Pemerintah Nagari mengenai Pemberdayaan Masyarakat. hanya saja hingga saat ini hanya ada SK Wali Nagari Pagadih tentang anggota kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Agam.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Julia Nanda Rasifa, Dasman Lanin (2023) yang mengungkapkan bahwa Peran Pemerintah Nagari sebagai regulator,

Pemerintah Nagari belum menetapkan peraturan mengenai peraturan aturan khusus atau SK mengenai pemberdayaan ekonomi kreatif.

**b. Peran Pemerintah Nagari sebagai Dinamisator**

Sebagai dinamisator, pemerintah berperan aktif dalam mendorong dan menggerakkan proses pemberdayaan. Peran ini melibatkan inisiatif untuk memotivasi, menginspirasi, dan mendukung masyarakat agar mereka lebih proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemerintah sebagai dinamisator melakukan berbagai kegiatan seperti memfasilitasi pelatihan dan pendidikan agar masyarakat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, mendorong inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, membangun jaringan dan kemitraan untuk memperluas peluang dan sumber daya yang dapat mereka akses, serta memberikan motivasi dan dukungan moral agar mereka lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengambil langkah-langkah pemberdayaan.

Hal ini sejalan dengan Penelitian pertama, menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Objek Wisata di Kamang Hilia memberikan dampak positif kepada masyarakat karena dengan adanya kerja sama pemerintah Nagari dengan pemerintah lainnya dan juga masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan Hamzah Luthfi, Gusril Basir (2023), Peran Pemerintah Nagari Dalam Pengelolaan Objek Wisata Luak Gadang di Nagari Kamamng Hilia sosialisai kepada masyarakat dan juga membentuk pokdarwis ikut juga di ikut sertakan dalam pelatihan yang di adakan. Selain itu dengan adanya sosialisasi yang di lakukan Pemerintah Nagari yang di adakan oleh Pemerintah Nagari Kamang Hilia berupa mengajak dan merangkul masyarakat agar sama sama mengelola objek wisata Luak Gadang sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

**c. Peran sebagai fasilitator**

Berdasarkan hasil pengamatan yang di lakukan peneliti di lapangan terkait peran fasilitator yang dilakukan Peran Pemerintah Nagari di temukan bahwa sudah ada beberapa fasilitas sarana prasarana yang di berikan Pemerintah Nagari dalam memerdayakan masyarakat khususnya Pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka seperti memberikan bantuan mesin pengolahan kopi dan mesin pemotong rumput.

**2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Nagari Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani di Nagari Pagadih**

**a. Faktor Pendukung**

Komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat, terjalannya komunikasi yang baik antara Pemerintah Nagari dengan masyarakat akan memudahkan dalam keberhasilan yang direncanakan

**b. Faktor Penghambat**

1) Terbatasnya Sumber Dana

Terbatasnya sumber dan dalam implementasi suatu program akan sulit mencapai keberhasilan dari program tersebut. dengan adanya dana yang memadai akan memudahkan Pemerintah Nagari dalam menjalankan program pemberdayaan secara efektif dan efisien, maka dari itu untuk menjalankan program pemberdayaan di butuhkan anggaran dana yang memadai agar dapat mencapai tujuan yang di inginkan.

2) Rendanya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dikarenakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak akan berlangsung dengan baik dan optimal apabila masyarakat tidak ikut serta dalam proses dan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

3) Pola Pikir

Pola pikir merupakan sikap mental mapan yang di bentuk melalui pendidikan, pengalaman dan prasangka. Pola pikir (mindset) adalah Salah satu hambatan dalam memberdayakan masyarakat yaitu karena kebanyakan

masyarakat masih memiliki cara berpikir yang tradisonal dan tata kelola yang kurang baik dalam menjalankan usahanya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Pagadih terhadap Pengembangan Kelompok usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka Sudah berperan cukup baik namun belum optimal. Hal ini dapat diketahui bahwa Peran Pemerintah Nagari belum menjalankan perannya secara maksimal yaitu, belum adanya Peraturan Nagari tentang Kelompok Usaha Tani, belum maksimalnya Pemerintah Nagari dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdek, belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka dan belum adanya izin legalitas produk Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis sampaikan kepada Pemerintah Nagari dapat memaksimalkan perannya dalam mengeluarkan kebijakan mengeluarkan kebijakan tentang peraturan Nagari mengenai Kelompok Usaha Tani agar dapat di jadikan pedoman oleh pelaku kelompok Usaha Tani.

#### E. Referensi

- Dan, T., Di, F., Simarlelan, D., Selatan, T., & Barat, S. (2024). Capacity Building Efforts For Village Officials and The Village Officials and The Village Consultative Body in Carryng Out Their Duties and Functions In Simarlelan Villag, *Administrasi Negara , Universitas Negeri Padang*. Dokumen Pemerintah Nagari Pagadih 2004  
Dokumen Pemerintah Nagari Tahun 2023 tentang Kondisi Geografis dan Tepografis Nagari Pagadih
- Eriyanti, F. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Suatu Tinjauan Relevansi Faktor Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanif. (2022). *Aplikasi Tapen Otentikasi Dana Pensiunan PNS.Rsddrsoebandi.Id*.
- Luthfi, H., & Basir, G (2023), *Peran Pemerintah Nagari Dalam Pengelolaan Objek Wisata Luak Gadang di Nagari Kamang Hilia*  
*Peraturan Daerah Kabuupaten Agam No 31 Tahun 2001 Tentang Nagari*
- Rasifa, J. N., & Lanin, D. (2023). *Peran Pemerintah Nagari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Ekonomi Produktif Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press
- Sutriani, E. L., & Octaviani. (2019). *Kelabsahan data. INA-Rxiv, 1–22*.
- Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa*
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.